

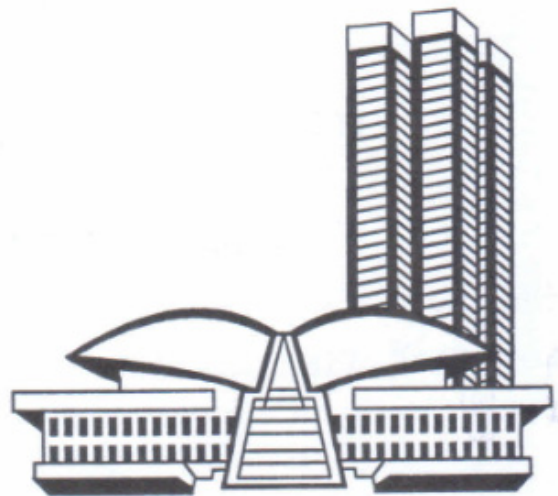
Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 1, Maret 2015

ISSN 0853-9316

- IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI STATUS HUTAN ADAT SEBAGAI HUTAN HAK
oleh: Dian Cahyaningrum
- PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014
oleh: Rahmi Yuningsih
- HUBUNGAN KAUSAL DINAMIS ANTARVARIABEL MAKROEKONOMI
DI INDONESIA DALAM KAJIAN KRISIS EKONOMI SEBAGAI KEJUTAN EKSTERNAL
oleh: Rasbin
- PENGARUH KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2013
oleh: Ari Mulianta Ginting
- ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA:
MANAJEMEN UTANG PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA
oleh: Venty Eka Satya



Diterbitkan oleh
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 1, Maret 2015

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
● IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI STATUS HUTAN ADAT SEBAGAI HUTAN HAK <i>oleh: Dian Cahyaningrum</i>	1-16
● PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 <i>oleh: Rahmi Yuningsih</i>	17-29
● HUBUNGAN KAUSAL DINAMIS ANTARVARIABEL MAKROEKONOMI DI INDONESIA DALAM KAJIAN KRISIS EKONOMI SEBAGAI KEJUTAN EKSTERNAL <i>oleh: Rasbin</i>	31-44
● PENGARUH KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2013 <i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	45-58
● ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA: MANAJEMEN UTANG PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA <i>oleh: Venty Eka Satya</i>	59-74

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kajian kembali kami hadirkan untuk para pembaca melalui edisi Volume 20, Nomor 1, Maret 2015. Edisi ini merupakan edisi pertama tahun 2015, menampilkan hasil penelitian dan kajian dari sudut pandang hukum, sosial, dan ekonomi. Pada edisi kali ini terdapat lima tulisan yang diharapkan dapat memberikan informasi baru yang dapat memperkaya pengetahuan bagi para pembaca.

Tulisan pertama berjudul *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak"* oleh Dian Cahyaningrum menjelaskan bahwa Putusan MK yang menyatakan hutan adat sebagai hutan hak dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif diperoleh hasil Putusan MK yang menguatkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Namun pengakuan tersebut mempersyaratkan adanya peraturan daerah penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang sampai sekarang belum terbentuk. Pada tataran empiris, Putusan MK dapat menimbulkan implikasi negatif yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk dicegah dan ditangani. Agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu segera dibentuk perda tentang penetapan masyarakat hukum adat yang disertai dengan wilayah adatnya. Selain itu RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga perlu segera dibentuk.

Tulisan kedua berjudul *"Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2014"* oleh Rahmi Yuningsih menjelaskan bahwa di era transisi saat ini, epidemiologi penyakit tidak menular terus mengalami peningkatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit menular masih terjadi di wilayah Indonesia terutama Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyakit menular perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) atau wabah. Kebijakan penanganan penyakit menular sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun walaupun telah ada kebijakan tersebut, status KLB masih kerap terjadi di Kabupaten Bantul. Melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan wabah di Kabupaten Bantul yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik penyakit, agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan disposisi.

Tulisan ketiga berjudul *"Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi Sebagai Kejutan Eksternal"* oleh Rasbin menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia yang semakin terbuka sangat peka terhadap kejutan (*shock*) eksternal sehingga berpengaruh terhadap pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi. Studi ini menganalisis pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi dengan menggunakan *vector error correction model* (VECM). Berdasarkan analisis GCT disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel makroekonomi yang bersifat (1) *feedback causality*, (2) *unidirectional causality* dan (3) *independence*. Dengan memasukkan *external shocks*, perubahan harga tidak direspon oleh perubahan tingkat suku bunga. Perubahan nilai tukar dan tingkat harga direspon positif oleh perubahan jumlah uang beredar. Perubahan suku bunga, harga dan jumlah uang beredar tidak direspon oleh perubahan nilai tukar. Perubahan variabel nilai tukar dan jumlah uang beredar direspon negatif oleh perubahan tingkat harga, tapi tidak merespon terhadap perubahan *output* dan suku bunga. Perubahan nilai tukar direspon positif oleh perubahan *output* riil.

Tulisan keempat berjudul *"Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013"* oleh Ari Mulianta Ginting merupakan hasil penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013 dihasilkan kesimpulan, bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan *Indeks Williamson* yang semakin menurun baik untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara variabel PDRB, investasi memiliki

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah harus melakukan *crash program* untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

Tulisan terakhir berjudul "*Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya*" oleh Venty Eka Satya merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah serta manajemen utang yang dilakukan pemerintah dan permasalahannya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970, sampai 1998. Pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak tahun 1999 Pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26 persen, turun dari 28,3 persen pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh UU tentang Keuangan Negara maupun standar "*Maastricht Treaty*" sebesar 60 persen, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB dari negara-negara lain. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah di antaranya berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undang yang ada belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang.

Demikian lima tulisan yang kami hadirkan dalam Jurnal Kajian edisi pertama Maret 2015. Redaksi berharap kelima tulisan tersebut dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para Anggota DPR RI yang membutuhkan analisis secara ilmiah untuk bidang-bidang yang relevan. Semoga tulisan-tulisan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca

Jakarta, Maret 2015

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Dian Cahyaningrum (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI STATUS HUTAN ADAT SEBAGAI HUTAN HAK

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, hlm. 1-16

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan hutan hak, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah. Artikel ini membahas masalah tersebut, sebagai penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Namun pengakuan tersebut mempersyaratkan adanya perda penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang sampai sekarang belum terbentuk baik di Riau maupun di Papua. Pada tataran empiris, Putusan MK tersebut juga dapat menimbulkan implikasi negatif, yang diupayakan oleh pemerintah untuk dicegah dan ditangani. Agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu segera dibentuk perda penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999.

Kata kunci: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, masyarakat hukum adat, hutan adat, hutan hak, pengakuan hukum adat, perlindungan hukum adat.

PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, hlm. 17-29

Di era transisi epidemiologi saat ini, dengan penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Bantul. Penyakit menular perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya KLB atau wabah. Kebijakan penanganan penyakit menular diperintahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Walaupun telah ada kebijakan itu peningkatan kejadian beberapa penyakit menular yang berpotensi menjadi KLB atau wabah masih terjadi di Kabupaten Bantul. Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular di kabupaten itu pada tahun 2014. Esai ini adalah hasil penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulan wabah di Kabupaten Bantul, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan disposisi.

Kata Kunci: Transisi epidemiologi, penanggulangan wabah, penyakit menular, kejadian luar biasa, Kabupaten Bantul.

HUBUNGAN KAUSAL DINAMIS ANTARVARIABEL MAKROEKONOMI
DI INDONESIA DALAM KAJIAN KRISIS EKONOMI SEBAGAI KEJUTAN EKSTERNAL

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, hlm. 31-44

Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka sangat peka terhadap kejutan eksternal sehingga berpengaruh terhadap pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi dengan menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM). Berdasarkan analisis GCT terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel makroekonomi yang bersifat (1) *feedback causality*, (2) *unidirectional causality* dan (3) *independence*. Dengan memasukkan *external shocks*, perubahan harga tidak direspon oleh perubahan tingkat suku bunga. Kemudian, perubahan nilai tukar dan tingkat harga direspon positif oleh perubahan jumlah uang beredar. Sedangkan perubahan suku bunga, harga, dan jumlah uang beredar tidak direspon oleh perubahan nilai tukar. Perubahan variabel nilai tukar dan jumlah uang beredar pun direspon negatif oleh perubahan tingkat harga, tetapi tidak merespon perubahan *output* dan suku bunga. Terakhir, perubahan nilai tukar direspon positif oleh perubahan *output* riil. Temuan ini berbeda ketika tidak memasukkan kejutan eksternal seperti studi Kharie tahun 2006.

Kata kunci: Hubungan kausal dinamis, variabel makroekonomi, krisis ekonomi, Indonesia, kejutan eksternal.

PENGARUH KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA 2004-2013

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, hlm. 45-58

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun mengabaikan azas pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, yang memunculkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan *crash program* untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat menurun lebih signifikan lagi di Indonesia.

Kata Kunci: ketimpangan pembangunan, antarwilayah, kemiskinan, Indonesia, PDRB, investasi, aglomerasi, 2004-2013.

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA:
MANAJEMEN UTANG PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA**

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, hlm. 59-74

Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia saat ini, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari, karena sumber-sumber penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Tulisan ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia serta manajemen utang yang dilakukan pemerintah dan permasalahannya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970, dan sampai dengan tahun 1998, pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26 persen, turun dari 28,3 persen pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh Undang-undang Keuangan Negara maupun standar Maastricht Treaty, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB negara-negara lain. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undang yang ada belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang.

Kata kunci: Utang luar negeri, utang dalam negeri, pengelolaan utang negara, manajemen utang pemerintah, Indonesia, defisit anggaran.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Dian Cahyaningrum (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

*THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION
ON THE STATUS OF TRADITIONAL FOREST AS ENTITLEMENT FOREST*

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, pp. 1-16

The Constitutional Court's Verdict No. 35/PUU-X/2012 which declared that the forest of indigenous people's communal right is no longer categorized as state forest can cause problem. This article discuss the problems produced by that Verdict, as part of a normative, as well as empirical, legal research conducted in 2014, using both primary and secondary data, which is qualitatively analyzed. Based on research result that the Constitutional Court's Verdict gives condition to create regional regulation (Perda) which acknowledges the existence of Indegenous Peoples and their jurisdiction which has not yet established both in Riau and Papua Province until recently. It also argues that empirically, the Constitutional Court's Verdict can bring about negative implication which has been prevented and handled by the government. To optimally recognize and protect the Indegenous Peoples, it is therefore necessary to create the Perda of acknowledges the existence of Indigenous Peoples and their jurisdiction make Law on Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples and amend law No. 41/1999.

Keywords: Constitutional Court Decision, customary law, traditional society, traditional forest, entitlement forest, recognition of customary law, protection of customary law

Rahmi Yuningsih (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

THE HANDLING OF COMMUNICABLE DISEASES OUTBREAK IN THE BANTUL MUNICIPALITY IN 2014

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, pp. 17-29

In current epidemiological transition era, in which non-communicable diseases continues to increase, infectious diseases are still a major health problem in Indonesia, particularly in the Bantul Municipality. Thus, it is necessary to seriously handle infectious diseases to prevent its enormous outbreak. A communicable disease outbreak policy is actually has been stipulated in the Law No. 4/1984 on Epidemic Diseases. Aside from this, some communicable diseases prevalence still tend to increase in the Bantul Municipality. This essay argues it is important to discuss the policy implementation through a research applying a qualitative approach. Data of this research was collected through in-depth interview with relevant informants. The research found that there are factors that hinder the implementation of the communicable disease outbreak policy in Bantul, namely the size and the goal of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, external environment, and its disposition.

Keywords: epidemiology transition, communicable diseases, communicable diseases policy, enormous outbreak, Bantul Municipality.

**DYNAMIC CAUSAL RELATIONS OF INTER-MACROECONOMIC VARIABLES
IN INDONESIA'S ECONOMIC CRISIS STUDY AS EXTERNAL SHOCKS**

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, pp. 31-44

Indonesia's more open economy is very sensitive to external shocks which affects the direction and pattern, as well as the dynamic causal relationship and the characteristic of macroeconomic variables. This study is aimed to analyze the pattern and the characteristic by applying Vector Error Correction Model (VECM). According to GCT test, it is found that there is a causal relationship of macroeconomic variables, involving (1) feedback causality, (2) unidirectional causality and (3) independence. Incorporating external shocks in this study, price changes was not responded by the change of interest rate. Mean while, the change of exchange rates and price was positively responded by the change of money supply. In contrast with this, the change of interest rates, prices, and money supply were not responded by the change of exchange rates. In line with this, the change of the exchange rate and money supply variables were negatively responded by the change of price level, but it did not respond the change of output and interest rates. Finally, the change of exchange rates was positively responded by the change of real output. This finding was different when it did not include external shock such as the 2006 Kharie study.

Keywords: Dynamic causal relations, macroeconomic variables, economic crisis, Indonesia, external shocks.

Ari Mulianta Ginting (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

THE INFLUENCE OF REGIONAL DISPARITY ON POVERTY IN INDONESIA DURING 2004-2013

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, pp. 45-58

Indonesia's economic development is intended to increase the country's people welfare, but its disconnection to equality principle causes regional disparities, which eventually leads to mass-poverty. This research aims to reveal the development of poverty and regional disparities, and to analyze the impact of regional disparities to regional GDP, agglomeration, and investment in increasing poverty in Indonesia. Using quantitative and qualitative methods and data from 2004 to 2013, it concludes that from the year 2004 to 2013, poverty level in Indonesia has decreased, in line with the decline in regional disparities. The decrease in regional disparities is indicated by the Williamson Index, and the result of quantitative analysis with a panel regression of data probes that the regional disparities and agglomeration show a positive and significant impact on poverty reduction in the country. In addition, the regional GDP and investment have a negative and significant impact on poverty reduction. Thus, the writer argues, the government should take a crash program to further reduce the regional disparities, a policy which is needed to more reduce mass-poverty in Indonesia.

Keywords: regional disparity, poverty, Indonesia, PDRB, investment, agglomeration, 2004-2013.

STATE DEBT MANAGEMENT POLICY ANALYSIS: GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT AND ITS PROBLEMS

Kajian Vol. 20, No. 1, Tahun 2015, pp. 59-74

In Indonesia's adopts budget deficit system, debt is an unavoidable financing source since state revenues could not cover the expenses. This essay employs library study that aims to obtain a general overview about the country's government debt, its debt management and problems. The Indonesia's government began obtaining its debt financing in 1970, and until 1998, it had only familiar with foreign debt. Since 1999 government had domestic debt. Government debt ratio to GDP at the end of 2013 is about 26 percent of GDP, which is lower than at the end of 2009, which reached 28,3 percent. Debt ratio to GDP is not only much lower than the limit that is allowed by Law of State Finance and Maastricht Treaty standard, and debt ratio to GDP of the other countries, as well. Although the condition of government's debt is considered safe, there are some weaknesses in the debt management, which potentially rises inefficiency in debt management and control.

Keywords: Foreign debt, government debt, debt management, government debt management, Indonesia, budget deficit.